

## **Pembangunan Perumahan Melalui Partisipasi Masyarakat**

Sukawi  
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof Soedarto SH Tembalang Semarang  
Telp . (024) 70 585 369  
[zukawi@gmail.com](mailto:zukawi@gmail.com) & [zukawi@yahoo.com](mailto:zukawi@yahoo.com)

### **Abstrak**

Perumahan merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya struktural, yaitu sebagai bagian dari peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pembangunan perumahan bukan hanya berupaya untuk mencapai sasaran kuantitatif saja, tetapi adalah juga sangat penting untuk memperhatikan pencapaian sasaran kualitatif agar dapat dimungkinkan perumahan yang sesuai dengan hakekat dan fungsinya.

Perumahan yang merupakan sarana tempat tinggal dapat dikatakan sebagai wadah kehidupan manusia yang bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari para penghuninya, tidak hanya menyangkut kuantitas melainkan kualitas. Tidak hanya menyangkut tempat hunian atau rumah, tetapi juga tempat kerja, berbelanja, bersantai, dan wahana untuk berpergian (singkatnya meliputi Wisma, Karya, Marga, Suka) (Budiharjo, 1997).

Kementerian Negara Perumahan Rakyat pernah mencatat bahwa jumlah keluarga Indonesia yang belum memiliki rumah di Indonesia sebanyak 9,6 juta sampai dengan tahun 2007. Sementara itu pertumbuhan kebutuhan rumah bagi keluarga baru mencapai 800.000 unit per tahun. Kebutuhan rumah tersebut sangat sulit dipenuhi karena permintaan dan pasokan yang lemah. Dari sisi permintaan, misalnya, walaupun masyarakat sangat membutuhkan rumah, tetapi daya beli kebanyakan masyarakat Indonesia masih sangat rendah karena rendahnya penghasilan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Untuk itu perlu pengalihan orientasi dari membangun rumah ke membangun permukiman. Pengelolaan pembangunan permukiman harus memungkinkan berkembangnya prakarsa membangun dari masyarakat sendiri melalui mekanisme yang dipilihnya sendiri. Di pihak lain kemampuan membangun permukiman secara komunitas harus direspon secara tepat oleh pemerintah, sehingga kebutuhan akan identitas tetap terjaga dalam kerangka pembangunan permukiman. Kelangkaan prasarana dasar dan ketidakmampuan memelihara serta memperbaiki permukiman merupakan masalah utama dari perumahan dan permukiman yang ada.

Masyarakat perlu diikutsertakan secara aktif dalam proses pembangunan permukiman. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya memperkuat kedudukan masyarakat guna mendampingi proses pembangunan yang disusun pemerintah menjadi suatu agenda yang penting untuk dilakukan. Dengan memberdayakan masyarakat untuk turun langsung membangun lingkungannya, maka masyarakat bisa merasakan langsung hasil yang telah dibangunnya.

*Kata Kunci : Pembangunan Perumahan, Pemberdayaan Masyarakat*

### **Pendahuluan**

Pembangunan perumahan memang menjadi dasar kebutuhan masyarakat dan tuntutan pemerintah (daerah/pusat) untuk memenuhinya. Akan tetapi apabila pembangunan perumahan hanya berdasarkan target penyelesaian tanpa memperhitungkan faktor lain, pembangunan tersebut akan lebih bernuansa pemborosan dan merusak daripada memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang

Rumah sebagai tempat tinggal dengan kapasitas standar memang diperlukan, selain harga terjangkau juga memenuhi standar tempat tinggal bagi pemilik menengah ke bawah. Akan banyak sekali kebutuhan akan rumah sederhana diiringi dengan penggunaan lahan bagi kebutuhan pembangunan unit rumah tersebut. Misalkan ada 13.000 unit rumah yang dibutuhkan, apabila satu unit rumah (tipe 21) memerlukan tanah minimal 36 m<sup>2</sup> akan dibutuhkan sekitar 468.000 m<sup>2</sup> lahan rumah. Belum lagi lahan yang dipergunakan sebagai lahan penunjang/infrastruktur, sesuai standar pembangunan

perumahan 40% diperuntukan sebagai lahan terbuka, sehingga dari total kebutuhan lahan baru adalah 1.170.000 m<sup>2</sup>.

Seperti yang kita ketahui, pembangunan rumah sederhana oleh pengembang tidak menguntungkan apabila tidak membangun rumah menengah dan mewah. Alokasi lahan bagi rumah bukan akan meningkat 3-4 kali lipat dari kebutuhan akan lahan.

Pembangunan perumahan yang berkelanjutan perlu bertumpu pada empat prinsip yang memperhatikan masa depan (*futurity*), lingkungan (*environment*), persamaan (*equity*) dan partisipasi (*participation*) dalam konteks meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjainin kualitas lingkungan. *Sustainable development* sangat terkait dengan suatu gerakan moral agar "jaminan" terdengarnya kualitas lingkungan (*conservation*) dapat terselenggara dengan baik dan dinikmati secara merata baik secara sosial maupun ekonomi oleh setiap lapisan masyarakat sekarang ini maupun generasi mendatang melalui proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

### **Pendekatan Partisipasi Masyarakat**

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Pendekatan partisipasi masyarakat sering didefinisikan pada peran aktif dari individu-individu masyarakat yang "terlibat atau dilibatkan" dalam menghasilkan "kesepakatan bersama" (*shared vision*) atas pokok-pokok bahasan penting yang terkait dengan program-program peningkatan lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Pendekatan yang melibatkan masyarakat ini disadari penting, karena permasalahan pembangunan yang ditangani oleh suatu negara atau permasalahan pembangunan dalam skala kota sekalipun, masih dirasakan terlalu luas untuk ditangani, Salah satu alternatif penanganan masalah pembangunan sudah semestinya diturunkan menjadi penanganan skala unit ketetanggaan, karena pada skala tersebut masyarakatnya justru sangat akrab dengan rutinitas masalah yang dihadapi langsung. Hal ini berarti, identifikasi permasalahan dapat ditelusuri melalui pemberdayaan masyarakat.

Sederet keuntungan dari *community participation*, antara lain: memotivasi masyarakat untuk berani mengemukakan aspirasinya; melatih bertanggung jawab atas berbagai masalah dan urusan mereka sendiri; mengembangkan kepemimpinan lokal; dan memindahkan birokrasi otoritas pemerintah pusat kepada pengelola lokal. Partisipasi juga memperkaya wacana pihak-pihak yang terlibat (*multi-valued discussion*) sehingga timbul keinginan untuk memahami masalah pihak lain.

Suatu pembangunan yang akan merubah suatu tatanan, akan sangat efektif jika melibatkan banyak orang. Keterlibatan banyak orang akan menyadarkan pada situasi yang sedang dan akan terjadi, sehingga mendorong mereka lebih tanggap khususnya berkaitan dengan kepentingan-kepentingan mereka.

"*Environmental empowerment*" atau pemberdayaan lingkungan akan berhasil jika masyarakat mendapatkan saluran kelembagaan. indikator yang menyebabkan masyarakat merasa diberdayakan dan lebih bertanggung jawab, yakni antara lain adanya:

- Kesempatan yang sama (*equal opportunity*) untuk saling berbagi pandangan-pandangan ke depan (*shared vision*),
- Akses kemudahan untuk menyumbangkan keahlian dan pengetahuan (*expertise and knowledge*) bagi kebutuhan mereka sendiri, dan
- Kapasitas atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang berdampak pada mereka.

Perencanaan pembangunan yang bersifat *top down* perlu diimbangi dengan proses *bottom up*, sehingga implementasi konsep pembangunannya tidak "*sloganistis*" tetapi akan mewujudkan-kongkret bermanfaat bagi masyarakat.

Paradigma *Bottom up* ini mempunyai keuntungan :

1. Masyarakat adalah pihak yang secara langsung menjadi pelaksana sekaligus obyek dari pembangunan.

2. Masyarakat adalah pihak yang langsung mengetahui apa yang mereka hadapi; apa yang mereka inginkan; dan bagaimana mengatasi dan mendapatkan apa yang mereka inginkan.
3. Masyarakat seringkali 'lebih tahu dan berpengalaman'; tetapi tidak tahu pemanfaatannya.
4. Staf di pemerintahan sebenarnya adalah sebagian dari anggota masyarakat. Pemerintah/ pihak yang berkuasa adalah pihak yang 'ditunjuk' oleh masyarakat untuk memberikan arahan pembangunan.
5. Masyarakat adalah modal dasar pembangunan, tanpa masyarakat pemerintah tidak ada.

### **Metoda Partisipasi Masyarakat**

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembangunan partisipatif. Metode yang digunakan adalah yang cocok dengan situasi dan kondisi pembangunan serta tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah Metode Community-Based. Pembuatan keputusan didasarkan atas masyarakat lokal sebagai ahlinya dan pendatang merupakan fasilitator teknis yang keberadaannya adalah untuk belajar. Metode yang terkait adalah Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Self-esteem, Assosiative strength, Resourcefulness, Action planning dan Responsibility (SARAR).

Kelebihan metode ini didasarkan atas alat interaktif, seringkali alat visual sehingga dapat diikuti oleh semua partisipan dengan berbagai tingkatan pengetahuan. Akibatnya masyarakat merasa mampu berpartisipasi dan merasa punya andil. Kelemahannya adalah PRA tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam kewenangan pengambilan keputusan atau sebagai input dalam manajemen proyek.

PRA, ditekankan pada pengetahuan lokal dan memberdayakan masyarakat lokal untuk melakukan penaksiran, analisis dan perencanaan secara mandiri. PRA menggunakan animasi kelompok dan latihan-latihan untuk melayani penggunaan informasi bersama, analisis dan aksi antar stakeholder.

SARAR, membangun pengetahuan lokal untuk memperkuat kapasitas daya perkiraan, penentuan prioritas, rencana, kreasi, organisasi serta evaluasi. Tujuannya adalah (a) menyediakan pendekatan multisektoral dan multilevel pada pembentukan tim melalui training, (b) Mendorong partisipan untuk belajar dari pengalaman masyarakat lokal sendiri daripada pengalaman ahli dari luar. (c) memberdayakan masyarakat dalam tingkat komunitas dan agen untuk memulai aksinya.

### **Tingkat Keterlibatan Masyarakat**

Sebagai suatu pendekatan proses pembangunan, partisipasi masyarakat ternyata memiliki model yang beragam. Masyarakat bisa saja hanya dilibatkan sebagai partner konsultasi pemerintah, atau berperan sebagai perumus program kesejahteraan mereka sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan, masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam program peningkatan kualitas lingkungan mereka sendiri.

Porterfield dan Hall (1995: 49) mencobamengemukakan suatu metoda melibatkan masyarakat dalam suatu rumusan yang disebut "STARR method".

STARR kepanjangan dari: *Study the problem* (Mengkaji masalah); *Act on the finding* (Melakukan tindakan terhadap, temuan kajian, bisa diterjemahkan sebagai langkah-langkah perencanaan atau perancangan); *Reassess the situation* (Melakukan tinjauan kembali atau rekonfirmasi antara rencana dengan situasi atau kenyataan di lapangan); dan *React accordingly* (Bersikaprealistik atau melakukan suatu penyesuaian antara rencana dan kenyataan).

Model keterlibatan masyarakat dapat juga dikembangkan berdasarkan tahap-tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu lingkungan atau kawasan binaan. Tahap-tahapan tersebut adalah (1) Tahap Identifikasi masalah; (2) Tahap Pengembangan Program /Rencana /Rancangan; (3) Sosialisasi Program /Rencana Rancangan; (4) Tahap Implementasi Program /Rencana /Rancangan- dan (5) Tahap Evaluasi.

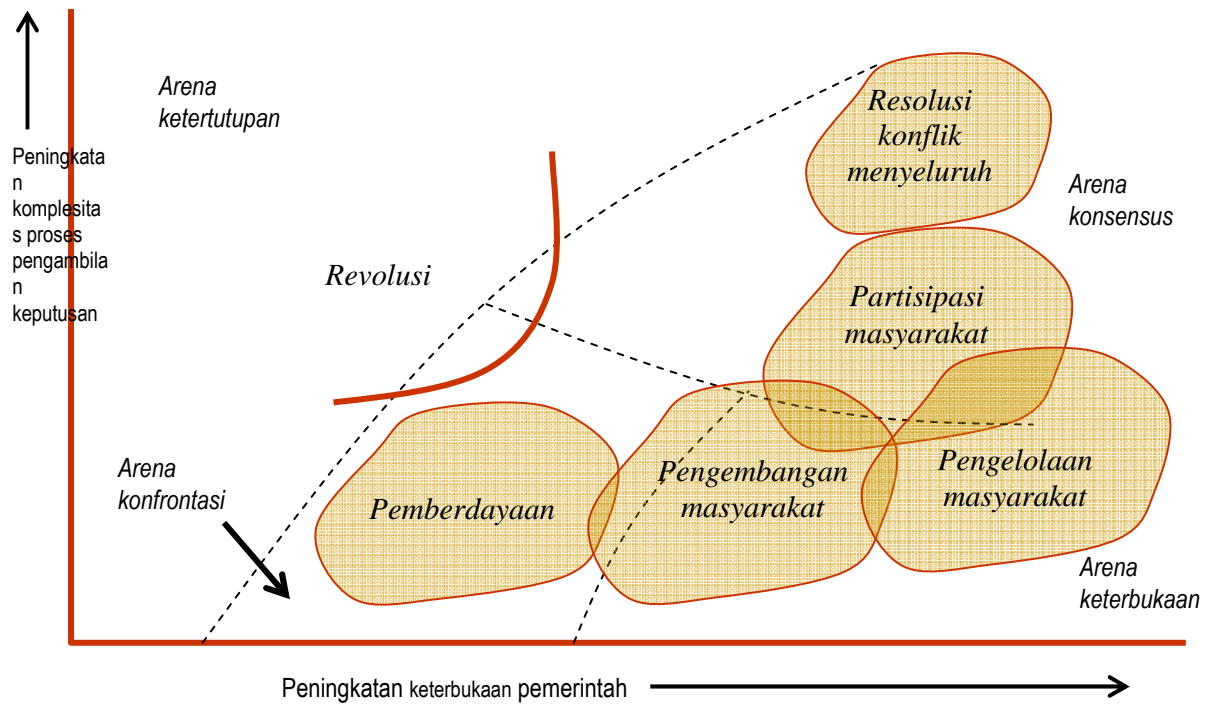
Partisipasi dalam Pembangunan Perumahan ada Empat pendekatan :

- Pengembangan masyarakat (*community development*)
- Pemberdayaan (*empowerment*)
- Pengelolaan masyarakat (*community management*)
- Partisipasi masyarakat (*negotiated development*)

Karakteristik Pendekatan Partisipasi

Karakteristik	Pengembangan Masyarakat	Pemberdayaan	Partisipasi Masyarakat
Peran pemerintah	Terbuka	Tertutup	Terbuka
Hakekat pengambilan keputusan	Sosial/ekonomi Program skala kecil, keluaran jelas	Politik/ekonomi Program dengan target tunggal, keluaran jelas	Ekonomi/teknis/sosial Tujuan ganda, program multi-sektoral
Dinamika masyarakat	Terfokus, melalui seleksi proyek	Terfokus, melalui kekuatan dari kebutuhan kelompok	Tersebar dan heterogen
Tujuan utama proses partisipatif	Terbatas, terpusat pada masyarakat, dikelola tanpa rujukan lingkungan yang lebih luas	Terpusat pada wilayah antara masyarakat dan pemerintah	Manajemen terpadu, ada interaksi dengan lingkungan yang lebih luas
Peran aktor eksternal	Fokus pada pelatihan	Fokus pendidikan kepada	Terpadu antara pendidikan dan latihan

Keterkaitan antar-Pendekatan Partisipasi



Pendekatan partisipasi biasanya menuntut suatu komitmen yang tinggi terhadap berbagai pihak yang terlibat. Komitmen untuk berperan serta dalam setiap langkah

perencanaan dan perancangan di atas akan berakibat pada waktu yang harus diluangkan bagi partisipan, serta macam forum komunikasi yang harus disediakan.

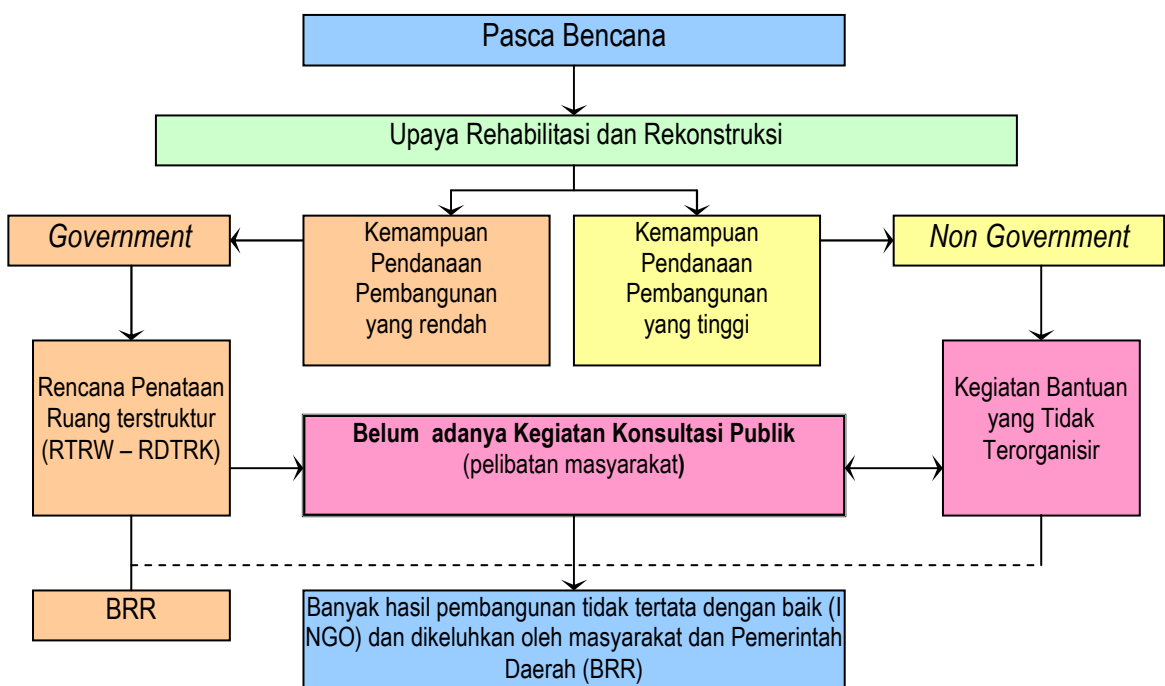
Idealnya, masyarakat terlibat dari awal sampai akhir. Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kendala waktu, khususnya jika dikaitkan dengan target atau output yang diinginkan. Strategi yang bisa dikembangkan adalah melibatkan masyarakat pada tahap-tahap tertentu yang memiliki bobot kepentingan yang cukup besar untuk mempengaruhi suatu program dan pelaksanaannya.

### **Partisipasi dalam Pembangunan Perumahan Pasca Bencana (Studi kasus di Teluk Dalam Nias Selatan dan Klaten - Yogyakarta)**

Upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang bersifat tanggap darurat yang dilakukan BRR tentunya tidak selamanya dilaksanakan di Nias Selatan. Direncanakan, kegiatan ini akan berakhir 2009 mendatang. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat juga perlu mempersiapkan diri dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan pada masa rekonstruksi dan rehabilitasi ini. Oleh karena itu, pengonsolidasian koordinasi antarpihak menjadi agenda penting untuk kelanjutan pembangunan.

Terlepas dari siapa pelaksana pembangunan pasca bencana di Nias Selatan, yang terpenting adalah pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Karena bagaimanapun, masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Hal ini sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang demokratis. Hal inilah yang belum banyak dilakukan, baik oleh pemerintah daerah, BRR, maupun lembaga-lembaga donor. Pelaksanaan program pembangunan masih bersifat *top down*.

Kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat yang sudah dilakukan di Teluk Dalam adalah pembangunan rumah yang difasilitasi oleh UB Habitat. Program yang dilakukan UN Habitat ini yaitu dengan memberdayakan masyarakat untuk turun langsung membangun rumahnya dengan model pemberian dana langsung untuk kebutuhan pembangunan rumah. Dengan demikian masyarakat bisa merasakan langsung hasil yang telah dibangunnya. Model seperti inilah yang nanti juga bisa diterapkan dalam proses pembangunan dengan lingkup yang lebih luas.



**Proses Pembangunan Pasca Bencana**  
 (Sumber: Tim P5 Undip, 2007)

Permasalahan yang muncul dari masyarakat berupa keluhan dan masukan atas hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana pembangunan namun hal ini tidak didukung dengan proses penyaluran aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah secara baik, dampaknya yaitu ketimpangan hasil pembangunan dengan harapan masyarakat. Salah satu permasalahan pembangunan tampak pada saat BRR dan pemerintah daerah berupaya untuk membuat rencana pembangunan Kota Teluk Dalam berupa Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Kota Teluk Dalam, dimana masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan dan tidak diikutsertakan secara aktif dalam proses penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya memperkuat kedudukan masyarakat guna mendampingi proses perencanaan pembangunan yang disusun oleh BRR dan pemerintah daerah menjadi suatu agenda yang penting untuk dilakukan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan perlu diperkuat dengan adanya suatu forum atau organisasi perencanaan berbasis masyarakat. Karena salah satu syarat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan adalah dengan adanya forum atau organisasi yang sifatnya berkelanjutan. Melalui suatu forum, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, sebaliknya forum tersebut juga dapat berperan menyampaikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat di tingkat bawah secara langsung. Dengan demikian, forum kota harus mencerminkan prinsip keterwakilan agar tetap terjaga komitmen bersama untuk membawa kepentingan-kepentingan masyarakat kepada pihak-pihak pengambil keputusan.

Dalam kegiatan konsultasi publik, konsep-konsep penataan kawasan lingkungan dan perumahan ditawarkan kepada warga Kota Teluk Dalam, dengan harapan akan muncul suatu bentuk perencanaan partisipatif yang mengarah pada perbaikan kondisi kawasan serta lingkungan perumahan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disepakati bersama.



Gambar 1 : Masyarakat menyampaikan usulan rencana pemanfaatan lahan dan perumahan di Kota Teluk Dalam pada pertemuan di Penginapan Harus Damai, Desa Lagundri

Untuk dapat memasukkan mereka dalam proses perubahan, maka upaya yang pertama kali perlu dilakukan adalah memahami pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional. Proses ini dapat memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya akan lebih efektif daripada memberikan pilihan yang sudah tertentu. Pengikutan masyarakat dalam proses perubahan dilakukan secara berangsur-angsur dari kelompok kecil menuju masyarakat lebih luas.

### Seminar Nasional Perumahan

Strategi Percepatan Pembangunan Perumahan Swadaya Berbasis Kearifan Lokal  
17 Desember 2008, Kampus Bina Nusantara – Universitas Bina Nusantara

Akses pada informasi dibuka dengan memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang akan dilakukan, norma-norma bermasyarakat yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak yang mereka peroleh, manfaat perubahan yang akan terjadi, masalah-masalah yang mungkin dihadapi, dsb.

Kapasitas organisasi lokal ditumbuhkan dengan melakukan pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat pada tingkat bawah (seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok peladang), dan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa/dusun, dsb. Tujuan pemerkuatan organisasi lokal ini adalah untuk menjadikan mereka mampu merencanakan perbaikan lingkungan mereka, mampu meningkatkan produktivitas, mampu bernegosiasi dengan pihak lain, mampu melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang bermanfaat. Teknik-teknik pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang, perbaikan sarana permukiman, pembangunan rumah, cara bercocok tanam, cara mengolah hasil kebun, melindungi mata air, dll. perlu diajarkan atau dipelajari bersama.



Gambar 2 : Contoh beberapa unit hunian yang merupakan bantuan dari NGO asing yang dikerjakan tanpa menyertakan partisipasi masyarakat sehingga banyak dari masyarakat yang enggan menepati rumah bantuan ini.

Rumah yang terbuat dengan konstruksi baja dan berbentuk panggung ini dengan lantai dinding kayu merupakan salah satu contoh bantuan rumah yang dilakukan oleh LSM asing. Bantuan rumah ini dalam bentuk langsung jadi tanpa adanya partisipasi masyarakat. Kenyataan dilapangan, banyak sekali rumah yang tidak dipakai oleh masyarakat penerima bantuan karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai penerima bantuan.



Gambar 3. Contoh hunian rumah tinggal yang mendapat bantuan dari Pemerintah dengan system partisipasi masyarakat dengan program P2 KP di Pangandaran

Rumah yang merupakan bantuan pemerintah dengan P2KP yang melibatkan masyarakat melalui KSM Kelompok Swadaya Masyarakat, dengan menerapkan konsep partisipasi masyarakat. Masyarakat penerima bantuan langsung diikut sertakan mulai dari proses desain sampai dengan proses pembangunan.



Gambar 5 : Salah satu bontoh hunian type 36 dengan bantuan pemerintah sebesar 20 juta dengan program P2 KP di Klaten dan Yogyakarta



Gambar 6 : Proses pembekalan yang dilakukan P2KP terhadap fasilitator yang membantu KSM untuk bantuan hunian korban gempa di Klaten dan Yogyakarta.

Ini adalah contoh rumah yang merupakan bantuan dari Word Bank yang masuk dalam program P2KP dengan menerapkan konsep patisipasi masyarakat. Maryarakat penerima bantuan langsung diikut sertakan mulai dari proses desain sampai dengan proses pembangunan. Masyarakat yang tergabung dalam KSM kelompok Keswadayaan Masyarakat.



Gambar 7 : Proses pembangunan rumah bantuan dengan system partisipatif yang mendapat kunjungan rutin dari team teknik pembangunan pasca bencana dari tim P2KP

### **Kesimpulan**

Partisipasi masyarakat diyakini menjadi bagian yang penting dalam setiap langkah perencanaan pembangunan. Namun tingkat keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dilingkungan mereka sangat tergantung dari "sikap pemerintah", "kapasitas masyarakat" dan "macam program pengembangannya". Tidak semua program yang melibatkan masyarakatakan selalu berlangsung secara berkelanjutan.

Diperlukan pengorbanan yang besar dari masyarakat baik di Teluk Dalam Nias Selatan maupun Klaten dan Yogyakarta untuk membangun perumahan yang layak huni dan mempunyai konstruksi yang kuat serta sebagai pelindung jika bencana menghadang mereka.



Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan mengikutkan mereka dalam perencanaan program-program pembangunan, dan menyertakan mereka sebagai pelaku aktif proses perubahan yang dilakukan. Untuk itu mereka perlu mempunyai akses terhadap informasi tentang berbagai hal yang menyangkut kehidupan mereka, mendorong mereka mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok yang mampu menyuarakan kepentingan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh pelaku-pelaku yang profesional, yang mempunyai kemampuan, komitmen dan perhatian pada masyarakat pedesaan terpencil yang relatif kurang pendidikan. Berbagai teknik dan bentuk-bentuk prasarana dan sarana serta pola-pola pelayanan khusus perlu diciptakan.

### **Daftar Pustaka**

Abbot, J. (1996). ***Sharing the City: Community Participation in Urban Management***. London: Earthscan.

Schubeler, P. (1996). ***Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management***. Washington: the World Bank.

Arnstein, S. (1969). A ladder of citizen participation, ***Journal of American Planner Association***, July 1969.

Choguill, M.B.G. (1996). A ladder of community participation for underdeveloped countries, ***Habitat International***, 20 (3), pp. 431 – 444

The World Bank (1996). ***The World Bank Participation Sourcebook***. Washington: the World Bank.

Departemen KIMPRASWIL (2001). ***Modul Pelatihan Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan (Modul 7.10)***. Jakarta: CBUIM Project